

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan sekuritisasi isu keamanan yang terjadi diantara negara-negara yang berada di zona riparian¹ sungai Mekong. Ide sekuritisasi dalam studi Hubungan Internasional pertama kali diperkenalkan oleh Ole Waever pada tahun 1995, konsep ini yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *Copenhagen School*.² Menurut Waever sekuritisasi terjadi ketika para elit mendeklarasikan sebuah isu menjadi masalah keamanan dan diterima oleh *audience* sebagai sesuatu yang mengancam.³ Salah satu contoh sekuritisasi tersebut dilakukan oleh pemerintah Kamboja dan Vietnam terkait dengan pembendungan di Sungai Mekong.

Sungai Mekong bersumber dari bagian timur dataran tinggi Tibet, turun memasuki wilayah Tiongkok dan membelah bagian barat dari provinsi Yunnan. Lembah sungai ini mengisi wilayah seluas 795.000 km²,⁴ dan merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia, serta ke-10 terbesar dalam hal volume (melepas 475km³ air setiap tahunnya). Hampir setengah dari keseluruhan panjang sungai yang membentang

¹ Menurut Soeryono (1979) zona riparian atau sempadan sungai merupakan alur pinggir kanan dan kiri sungai yang terdiri dari bantaran sungai, bantaran longsor, bantaran ekologi, serta bantaran keamanan. Diakses dari [http://a-research.upi.edu/operator/upload/chapter2\(10\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/chapter2(10).pdf) (terakhir diakses 08 Maret 2017)

² Yandry K. Kasim. *Securitization and Desecuritization in Indonesia's Democratic Transition: a Case Study of Aceh Separatist Movement* (University of Freiburg), hal.1

³ Ole Waever, "Securitization and Desecuritization", *On Security*, Ed by Ronnie Lipschutz, New York, Columbia University Press, 1998, hal 6

⁴ Richard P. Cronin and Timothy Hamlin, *Mekong Tipping Point : Hydropower dams, human security and regional stability* (Washington, DC: The Henry L. Stimson Center , 2010), hal. 1

sekitar 4.800 km ini berada di wilayah bagian Tiongkok, sementara sisanya terus menembus Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

Kasus sekuritisasi bermula dari dimulainya proyek bendungan pembangkit listrik di aliran sungai Mekong. Pengembangan PLTA di bagian hulu Sungai Mekong telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, dimulai dengan bendungan Manwan di bagian Tiongkok sekitar tahun 1988. Sementara dibagian bawah (hilir) Sungai Mekong terdapat 11 proyek bendungan yang akan dibangun, dimana 9 diantaranya berada di Laos sementara sisanya di wilayah Kamboja.⁵ Dibandingkan dengan negara riparian lainnya, Laos merupakan negara yang paling berambisi dalam membangun proyek bendungan raksasa di Sungai Mekong. Hal ini tampak dari hasrat mereka yang ingin menempatkan diri sebagai “baterai Asia Tenggara” dengan menjadi negara pemasok listrik utama di kawasan ini.⁶

Proyek bendungan raksasa pertama yang dibangun pemerintah Laos di Sungai Mekong berada di provinsi Xayaburi dengan lebar mencapai 820 meter dan tinggi 107 kaki (33meter).⁷ Proyek bendungan ini memang dipelopori oleh Xayaburi Power Company yang berbasis di Laos, tetapi hampir keseluruhan biayanya didanai oleh tiga perusahaan Thailand, yakni: Ch. Karnchang Pcl (CK), PTT Pcl (PTT) dan Electricity

⁵International Rivers. *The Lower Mekong Dams Factsheet Text*. Diakses dari <https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-factsheet-text-7908> (terakhir diakses 14 Desember 2016)

⁶ Radio Netherlands Worldwide. *Mekong countries delay Laos dam decision*. Diakses dari <https://www.rnw.org/archive/mekong-countries-delay-laos-dam-decision> (terakhir diakses 5 Juni 2016)

⁷ National Geographic. *Dam Projects Ignite a Legal Battle over Mekong River's Future*. Diakses dari <http://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/07/140711-mekong-river-laos-thailand-dams-environment/> (terakhir diakses 10 Desember 2016)

Generating Pcl (EGCO).⁸ Kontribusi Thailand dalam proyek ini tak hanya dalam hal investasi saja, kedua negara telah sepakat untuk mengekspor sebanyak 95% dari keseluruhan listrik yang akan dihasilkan oleh Xayaburi ke Thailand.⁹

Proyek bendungan raksasa ini diprediksi akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Laos dan Thailand. Konstruksi bendungan Xayaburi menghabiskan dana sebesar 3,8 miliar USD.¹⁰ Laos akan mendapat aliran dana segar dari investor asing sehingga berpotensi menambah devisa negara. Sementara itu dipihak Thailand CH Karchang saja bisa mendapatkan penghasilan hingga lebih dari 430 juta USD pertahun selama periode konsesi 29 tahun, terhitung saat bendungan ini beroperasi penuh.¹¹

Meskipun Laos dan Thailand mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari proyek ini, hal yang sama tidak dirasakan oleh Kamboja dan Vietnam. Perkembangan *Hydropower* dengan pembangunan bendungan pada arus utama dinilai sangat rentan dan beresiko merusak ekosistem lingkungan dalam skala yang sangat besar. Selama proses penyitaan sejumlah besar air dibelakang bendungan selama periode pengisian, negara-negara hilir akan mendapatkan penurunan debit air secara dramatis di musim

⁸ International Business Times. *A Dam Conundrum: Xayaburi Project Could Help Laos And Thailand, Hurt Cambodia And Vietnam*. Diakses dari <http://www.ibtimes.com/dam-conundrum-xayaburi-project-could-help-laos-thailand-hurt-cambodia-vietnam-859904> (terakhir diakses 12 September 2016)

⁹Radio Netherlands Worldwide. *Mekong countries delay Laos dam decision*. Diakses dari <https://www.rnw.org/archive/mekong-countries-delay-laos-dam-decision> (terakhir diakses 12 September 2016)

¹⁰ Channel News Asia. *'Vicious capitalism' speeds up completion of first mainstream dam in Lower Mekong*. Diakses dari <http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/vicious-capitalism-speeds-up-completion-of-first-mainstream-dam/3293224.html> (terakhir diakses 08 Maret 2017)

¹¹ Ibid

kemarau¹². Ikan dan spesies air lainnya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekosistem secara tiba-tiba ini. Sementara lebih dari sepertiga spesies ikan di sungai Mekong bermigrasi hingga 1.000 kilometer di sepanjang sungai untuk memberi makan dan berkembang biak.¹³ Konstruksi bendungan akan memblokir migrasi ikan dan mengubah habitat alami mereka, membuat 100 spesies ikan terancam punah.¹⁴

Dampak terhadap perikanan sangat penting karena ikan menyediakan sumber utama protein bagi sebagian besar dari penduduk yang tinggal di *Lower Mekong Basin* (LMB). Lembah hilir sungai Mekong adalah pedalaman dengan ikan paling produktif di dunia, memproduksi antara 2-3 juta ton ikan per tahun dengan nilai mencapai 2-3 miliar USD pada penjualan pertama dan nilai eceran hampir 8 miliar USD.¹⁵ Hal ini menyebabkan ketahanan pangan sebanyak lebih dari 2 juta orang akan terancam.¹⁶ Kamboja sebagai negara dengan konsumsi ikan tawar perkapita tertinggi di dunia akan mendapatkan pukulan terbesar karena bergantung pada ikan hingga tiga perempat dari asupan protein mereka.¹⁷

¹² Goh, E. (2006). *China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on the Lancang Jiang*. In Caballero-Anthony, R. Emmers & A. Acharya (Eds.), *Non-Traditional Security in Asia*. Hampshire and Burlington: Ashgate, hal. 229.

¹³ International Rivers. *The Lower Mekong Dams Factsheet Text*. Diakses dari <https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-factsheet-text-7908> (terakhir diakses 14 Desember 2016)

¹⁴ Ibid

¹⁵ Australian Mekong Resource Centre, 'What do MRC studies tell us about the implications of Mekong mainstream dams for fisheries?', Mekong Brief no. 9 (Sydney: Australian Mekong Resource Centre, November 2008).

¹⁶ International Rivers. Diakses dari <https://www.internationalrivers.org/resources/the-lower-mekong-dams-factsheet-text-7908> (terakhir diakses 14 Desember 2016)

¹⁷ Eric Baran. *Fish and Nutrition of Rural Cambodians* (Asian Journal of Agriculture and Food Sciences), hal.2

Bendungan juga akan menahan hampir dari setengah beban sedimen tahunan yang berasal dari bagian hulu Sungai Mekong, karena terjebak oleh infrastruktur bendungan. Hal ini akan mengakibatkan erosi yang lebih di hilir yang akan mengubah arah saluran, melemahkan struktur dan meningkatkan erosi pantai dan salinitas.¹⁸ Sebagai negara pemasok beras terbesar kedua di dunia, pertanian Vietnam sangat bergantung pada kesuburan tanah, sedimen, serta debit air alami dari sungai ini. Sebesar 90% ekspor beras Vietnam berasal dari daerah yang menempati delta Sungai Mekong.¹⁹ Hal yang sama juga dialami oleh Kamboja dimana 80% dari sawah dinegara ini terkait erat dengan banjir tahunan.²⁰

Berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh pembendungan Sungai Mekong tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi banyak pihak. Kecaman paling keras datang dari pemerintah Kamboja dan Vietnam sebagai pihak yang merasa paling dirugikan. Perwakilan dari kedua negara tak hentinya mengeluarkan pernyataan terkait penolakan terhadap dilanjutkannya proyek bendungan Xayaburi oleh pemerintah Laos. Kamboja bahkan sempat mengancam akan menyeret Laos ke pengadilan internasional apabila proyek Xayaburi tetap berjalan tanpa adanya konsensus regional.²¹ Terjadinya gesekan kepentingan antara Kamboja, Vietnam, Laos dan Thailand terkait

¹⁸ Blake, D. (2001). Proposed Mekong Dam Scheme in China Threatens Millions in Downstream Countries. *World River Reviews*, June 5, hal. 5

¹⁹ International Rivers. *Vietnam Screams for Halt to Mekong Dams as Delta Silts Up*. Diakses dari <https://www.internationalrivers.org/resources/8341> (terakhir diakses 12 Desember 2016)

²⁰ Roberts, T. (2001). Downstream Ecological Implications of China's Lancang Hydropower and Mekong Navigation Projects. *International Rivers Network pape*, hal. 8

²¹ Radio Free Asia. *Cambodia Warns Laos Over Mekong Dam*. Diakses dari <http://www.rfa.org/english/news/cambodia/dam-04192012143244.html> (terakhir diakses 08 Maret 2017)

pembangunan bendungan Xayaburi akhirnya berujung pada perdebatan panas didalam *Mekong River Commission* (MRC) dimana keempat negara tersebut menjadi anggotanya.

MRC adalah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yang didirikan oleh Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam pada tanggal 5 April 1995. Perjanjian yang ditandatangani adalah mengenai kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan dari Sungai Mekong dan menyetujui pengelolaan bersama dari sumber daya air mereka dan pengembangan potensi ekonomi sungai. Sebagai fasilitator dan badan penasehat yang diatur oleh kementerian air dan lingkungan dari empat negara, MRC memastikan perkembangan yang efisien dan saling menguntungkan dari Sungai Mekong dan meminimalisir potensi konflik kepentingan di kawasan bawah lembah Sungai Mekong. Dilihat dari struktur organisasinya MRC terdiri dari tiga badan permanen yaitu: Dewan, Komite Bersama, dan Sekretariat .²²

MRC melakukan pertemuan anggota Dewan setiap tahunnya yang dihadiri oleh kementerian air dan lingkungan dari empat negara. Kemudian, Komite Bersama MRC yang terdiri dari para pejabat senior setingkat Kepala Departemen dan didukung oleh lembaga nasional termasuk Departemen Luar Negeri bertemu dua kali setahun dan menyusun laporan kepada Dewan. Komite ini berfungsi sebagai *Board of Management*. Sementara itu, Sekretariat MRC berfungsi sebagai lengan operasional organisasi dan melakukan fungsi teknis dan administratif yang memfasilitasi

²² Mekong River Commission. *About MRC*. Diakses dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/> (terakhir diakses 12 Desember 2016)

pertemuan regional dari Negara-negara Anggota dan memberikan saran teknis pada perencanaan bersama, koordinasi dan kerjasama.²³ MRC juga memiliki Komite Nasional Mekong yang diberada di tiap negara anggota dalam kapasitasnya di level domestik.

Sejak pertama kali didirikan hingga sekarang MRC telah mengadopsi serangkaian aturan dan prosedur dimana salah satunya adalah *Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)*.²⁴ Ini merupakan persyaratan dari Perjanjian Mekong 1995 bagi negara-negara anggota untuk bersama-sama meninjau setiap proyek pembangunan yang diusulkan bagi aliran utama Mekong dengan tujuan untuk mencapai konsensus tentang apakah sebuah proyek dilanjutkan atau tidak dan jika demikian, dalam kondisi apa.²⁵ Pembangunan bendungan Xayaburi adalah kasus pertama yang akan melewati serangkaian proses ini.

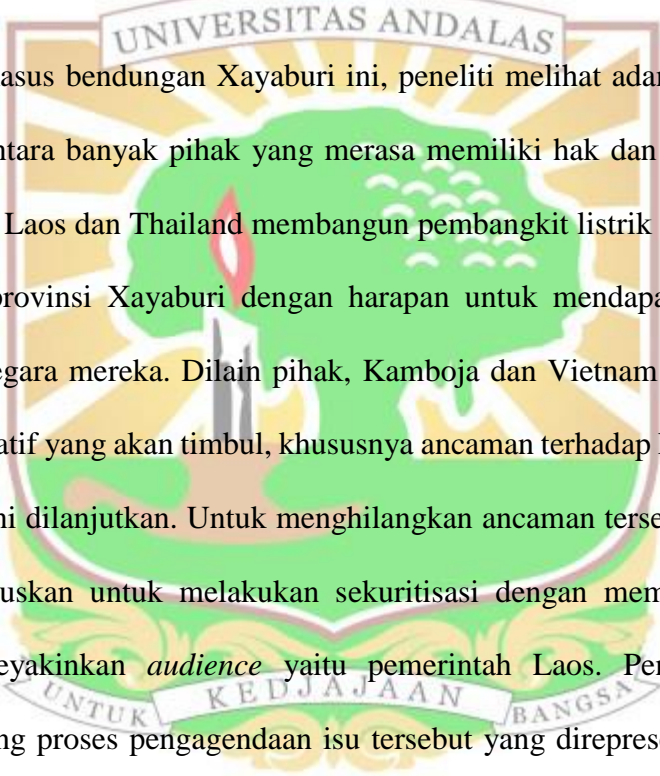
Setelah melewati proses konsultasi PNPCA dibawah payung MRC, Laos akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan tambahan dana sebesar 100 juta USD untuk melakukan modifikasi model pada konstruksi bendungan Xayaburi. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Laos diklaim akan meminimalisir dampak negatif PLTA terhadap lingkungan dan dengan dibangunnya jalur khusus akan memungkinkan

²³ Mekong River Commission. *Governance and Organisational Structure*. Diakses dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/governance-and-organisational-structure/> (terakhir diakses 12 Desember 2016)

²⁴ Mekong River Commission. *About MRC*. Diakses dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/> (terakhir diakses 12 Desember 2016)

²⁵ Mekong River Commission. *Xayaburi Hydropower Project Prior Consultation Process*. Diakses dari <http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/xayaburi-hydropower-project-prior-consultation-process/> (terakhir diakses 12 Desember 2016)

migrasi ikan dan lewatnya sedimen dari hulu ke hilir sungai.²⁶ Laos melakukan ini sebagai jawaban atas *concern* dari pihak Kamboja dan Vietnam. Pada November 2012, Laos akhirnya resmi mengadakan *ground-breaking ceremony* bendungan Xayaburi yang dihadiri oleh investor Thailand serta duta besar dari negara Kamboja dan Vietnam yang sebelumnya menolak keras dilanjutkannya PLTA ini.²⁷



Dalam kasus bendungan Xayaburi ini, peneliti melihat adanya tarik menarik kepentingan diantara banyak pihak yang merasa memiliki hak dan kepemilikan atas Sungai Mekong. Laos dan Thailand membangun pembangkit listrik tenaga air dengan skala besar di provinsi Xayaburi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi negara mereka. Dilain pihak, Kamboja dan Vietnam merasa terancam atas dampak negatif yang akan timbul, khususnya ancaman terhadap ketahanan pangan apabila proyek ini dilanjutkan. Untuk menghilangkan ancaman tersebut Kamboja dan Vietnam memutuskan untuk melakukan sekuritisasi dengan memanfaatkan forum MRC untuk meyakinkan *audience* yaitu pemerintah Laos. Penelitian ini akan membahas tentang proses pengagendaaan isu tersebut yang direpresentasikan sebagai ancaman nyata oleh elit politik terkait pembendungan di Sungai Mekong.

²⁶ Yale Enviroment. *Life on Mekong Faces Threats As Major Dams Begin to Rise*. Diakses dari http://e360.yale.edu/features/life_on_mekong_faces_threats_as_major_dams_begin_to_rise (terakhir diakses 5 Juni 2017)

²⁷ The Nation Thailand Portal. *Laos holds ground-breaking ceremony for Mekong dam project*. Diakses dari <http://www.nationmultimedia.com/aec/Laos-holds-ground-breaking-ceremony-for-Mekong-dam.html> (terakhir diakses 15 Juni 2017)

1.2 Rumusan Masalah

Kasus sekuritisasi bermula dari dimulainya proyek bendungan pembangkit tenaga listrik pertama di *Lower Mekong Basin* (LMB) atau bagian hilir sungai Mekong. Bendungan Xayaburi merupakan proyek PLTA yang dibangun oleh pemerintah Laos dan bekerjasama dengan investor Thailand. Konstruksi bendungan Xayaburi akan menghambat aliran sedimen dari bagian hulu sungai serta mengancam populasi ikan di sungai Mekong. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak Kamboja dan Vietnam yang sangat bergantung terhadap aliran sungai Mekong dalam menjaga ketahanan pangan dinegaranya. Kedua negara melakukan sekuritisasi untuk meyakinkan Laos sebagai audience agar segera menghentikan ancaman yang timbul akibat keberadaan bendungan tersebut. Proses sekuritisasi yang dilakukan sebagian besar berada didalam ranah MRC, dimana keempat negara yang terlibat menjadi anggotanya. Peneliti akan fokus pada usaha elit politik yakni pemerintah Kamboja dan Vietnam dalam memperlihatkan tingkat keseriusannya untuk meyakinkan Laos sebagai *audience* pada proses pengagendaan isu ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah *Bagaimanakah proses sekuritisasi pembangunan bendungan Xayaburi oleh Laos di aliran sungai Mekong?*

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan proses pengagendaan isu keamanan oleh elit politik dan sosial terkait pembangunan bendungan Xayaburi di Sungai Mekon

1.5 Manfaat Penelitian

1. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang proses pengagendaan isu menjadi isu keamanan seperti yang dilakukan oleh elit politik dan sosial terkait dengan pembangunan bendungan Xayaburi di aliran Sungai Mekong.
2. Menjadi pedoman bagi pembaca untuk memahami tentang proses dan serangkaian akibat dari sekuritisasi dan bisa melihat bagaimana keterkaitan antara masalah regional dan domestik sebuah negara.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam memahami masalah pemanfaatan sungai internasional.

1.6 Studi Pustaka

Saat ini semakin banyak diterbitkan buku, karya ilmiah, laporan penelitian, maupun jurnal ilmiah yang membahas masalah isu keamanan disepanjang Sungai Mekong. Pada penelitian ini, akan ditampilkan beberapa tulisan yang juga menelaah permasalahan ini dan akan mendukung penelitian penulis.

Pertama, untuk memahami bagaimana konsep sekuritisasi, penulis mengacu pada buku karya Barry Buzan bersama Ole Waever dan Jaap De Wilde yang berjudul *Security a New Framework for Analysis*²⁸. Dalam buku ini Buzan dan kawan-kawan

²⁸ Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde, (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner.

terlihat menawarkan sebuah pendekatan baru dalam melihat isu keamanan. Namun mereka terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep keamanan tradisional dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional sebelum akhirnya masuk kependekatan baru tersebut. Hal ini bertujuan agar tampak perbedaan jelas antara konsep keamanan tradisional dengan konsep keamanan baru yang ditawarkan. Apabila berbicara konsep keamanan tradisional, kita hanya akan melihat keamanan sebagai isu dibidang militer dan negara sebagai aktor utamanya saja. Lain halnya dengan pendekatan baru yang memandang isu keamanan tidak hanya dilihat lagi dari kerangka konsep militer dan politik dengan hanya aktor negara saja, melainkan isu keamanan harus dilihat dalam berbagai sektor, aktor dan level analisis.²⁹

Dalam buku ini Buzan menjelaskan tentang isu keamanan tidak lagi hanya ada dalam sektor militer namun juga ada dalam sektor politik, sektor ekonomi, sektor kemasyarakatan dan sektor lingkungan.³⁰ Aktor yang terlibat tidak lagi hanya negara melainkan juga organisasi internasional seperti, kelompok kepentingan dan kelompok penekan (perusahaan multi-nasional dan trans-nasional), organisasi non-pemerintahan (global, regional dan lokal), kaum epistemik, individu, partai politik dan lain-lain).³¹ Penulis menggunakan buku *Security a New Framework for Analysis* untuk memahami konsep sekuritisasi, dasar-dasar konsep sekuritisasi dan pembahasan 5 sektor penting sekuritisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Barry Buzan dan kawan-kawan yaitu penelitian ini fokus pada proses sekuritisasi dan aplikasi konsep sekuritisasi ini

²⁹ *Ibid*, hal.22

³⁰ *Ibid*,hal.22-23

³¹ Buzan

terkait pembangunan bendungan di sungai Mekong, sementara Buzan hanya menjelaskan tentang sekuritisasi secara general, persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama menjelaskan tentang konsep keamanan non-tradisional dan sekuritisasi.

Peneliti juga akan mengacu pada penelitian Ralf Emmers yang berjudul “*The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*”.³² Emmers mengangkat sekuritisasi isu kejahatan transnasional di ASEAN sejak tahun 1997. Dibagian awal dijelaskan posisi isu kejahatan lintas negara dalam debat keamanan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan elaborasi singkat mengenai *Copenhagen School* dan teori sekuritisasinya. Selanjutnya Emmers memeriksa apakah kejahatan transnasional telah diartikulasikan dalam konsep keamanan dalam kerangka ASEAN. Makalah ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota telah membuat pernyataan di mana mereka membuat klaim tentang keamanan dalam konteks kejahatan. Namun, hal ini belum mampu untuk mendorong para pembuat kebijakan regional untuk mengadopsi respon keamanan bersama. Tindakan sekuritisasi disini masih bersifat retorik dan belum menghasilkan sebuah kebijakan nyata. Penelitian ini menegaskan bahwa ASEAN telah gagal untuk melaksanakan aksi bersama dalam menangani kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.³³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Emmers yaitu terletak pada perbedaan isu sekuritisasi yang diangkat serta elit politiknya. Penelitian ini akan fokus

³² Emmers, Ralf. *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN* (Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 2002)

³³ *Ibid*

pada proses mengagendakan isu menjadi isu keamanan yang berada didalam kerangka MRC sementara Emmers membahas sekuritisasi isu kejahatan transnasional didalam wadah ASEAN.

Untuk melihat kasus sekuritisasi di kawasan Asia, peneliti mengacu pada penelitian Mely Caballero dan Anthony yang berjudul *Non-Traditional Security in Asia: The Many Faces of Securitisation*.³⁴ Penelitian ini mengambil dua contoh kasus sekuritisasi yang terjadi di wilayah Asia, yaitu sekuritisasi isu kemiskinan dan isu penyakit menular. Pada sekuritisasi isu kemiskinan yang terjadi di Malaysia pasca tahun 1970, terlihat bagaimana pemerintah Malaysia melakukan intervensi dan mengambil peran utama dalam proses sekuritisasi. Hal yang sama juga terjadi pada sekuritisasi penyakit menular yang terjadi di negara Asia. Saat wabah flu burung melanda Indonesia dan SARS menyerang Tiongkok, pemerintah di kedua negara mengambil alih proses sekuritisasi dan mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengendalikan situasi.³⁵

Kedua kasus ini memperkuat gagasan bahwa negara adalah aktor penting dalam sebagian besar proses sekuritisasi yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan sumber daya yang tersedia, negara memainkan peran yang dominan dalam menentukan isu-isu yang akan disekuritisasi termasuk didalamnya isu kemiskinan, pembangunan ekonomi, penyakit menular, migrasi ilegal, dan sebagainya. Negara juga dapat memastikan proses sukses sekuritisasi dengan melakukan kebijakan yang konkret dan

³⁴ Caballero, Mely, dan Anthony. *Non-Traditional Security in Asia: The Many Faces of Securitisation* (University of Warwick, 26-28 October 2005)

³⁵ *Ibid*, hal.22-23

melakukan penyesuaian kelembagaan dan struktural yang diperlukan untuk melihat proses melalui.³⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mely Caballero dan Anthony terletak pada bidang isu dan posisi aktor yang memainkan peran di proses sekuritisasi.

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan, penelitian dari Jeffrey W. Jacobs yang berjudul *The Mekong River Commission :Transboundary Water Resources Planning and Regional Security*.³⁷ Dalam penelitiannya ini Jeffrey melihat bahwa Komisi Sungai Mekong (MRC) yang didirikan pada tahun 1995 hingga pada tahun 2001 telah mengalami pergeseran dalam perencanaannya. Hal ini tampak pada program kerja MRC pada tahun 2001 yang bergeser dalam perencanaan DAS Mekong dari era Komite Mekong (MC).

Pergeseran ini menurut Jeffrey sebagian besar diwujudkan oleh berubahnya fokus yang berorientasi proyek menjadi pelestarian sumber daya yang ada dengan manajemen yang lebih baik. Posisi MRC saat ini juga untuk membantu mengatasi isu-isu terkait pertumbuhan penduduk, pelestarian lingkungan maupun keamanan regional. Disini Jeffrey juga menyimpulkan bahwa MRC akan mendapatkan keuntungan dari program dan kerjasama internasional yang didirikan oleh pendahulunya.

Christopher G.Baker dalam tulisannya yang berjudul *Dams, Power, and*

³⁶ *Ibid*, hal.22

³⁷ Jeffrey, Jacobs. *The Mekong River Commission : Transboundary Water Resources Planning and Regional Security* (The Geographical Journal, Vol.168, No.4, Desember 2002)

*Security in the Mekong :A Non Traditional Security Assessment of Hydro-Development in the Mekong River Basin.*³⁸ Disini Baker ini menunjukkan pentingnya penggunaan konsep keamanan non-tradisional dalam kaitannya terhadap isu keamanan internasional. Dalam kasus ini, tanpa pemahaman tentang dampak lingkungan dari proyek PLTA, terutama untuk *water and food security*, tidak mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang risiko terhadap orang-orang yang tinggal di lembah Sungai Mekong dan negara dimana mereka tinggal.

Dibandingkan dengan pendekatan *top-down state-centric* atau pendekatan *bottom-up* yang memfokuskan diri terutama pada individu, penelitian ini lebih memilih pendekatan yang meneliti interaksi antara keduanya. Baker juga menambahkan bahwa dampak potensial pada *water and food security*, migrasi tidak teratur dan stabilitas negara harus mendapat perhatian serius oleh semua pembuat kebijakan regional. Tentu saja pihak-pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki kemauan serius dan kerja keras ditengah diplomasi sulit untuk bekerja sama dengan satu sama lain.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memperlihatkan apa yang dipertaruhkan jika para pemimpin di kawasan ini gagal untuk bekerja sama, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air ini terus berlanjut di Sungai Mekong. Jika negara dan pemimpin terus melihat Sungai Mekong dari perspektif ekonomi picik, melihat sungai hanya dalam kapasitasnya untuk menghasilkan listrik dan hanya bertindak dalam

³⁸ Christopher G.Baker, '*Dams, Power, and Security in the Mekong :A Non Traditional Security Assessment of Hydro-Development in the Mekong River Basin*' (S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS))

kepentingan mereka sendiri dan laba perusahaan semata, maka ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut tak dapat dihindarkan.

Dari studi pustaka di atas, tampak jelas sangat membantu Peneliti dalam memahami perdebatan mengenai proses sekuritisasi. Studi pustaka tersebut menjadi penting bagi peneliti sebagai dasar pengetahuan tentang konsep sekuritisasi serta penerapannya dalam berbagai bidang isu. Beberapa studi memberikan pengetahuan tentang proses sekuritisasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti isu kejahatan transnasional, kemiskinan dan penyakit menular. Namun penelitian mengenai sekuritisasi yang melibatkan tak hanya satu melainkan banyak negara di kawasan masih minim. Walaupun perhatian terhadap sungai Mekong telah mengalami peningkatan, akan tetapi studi yang fokus terhadap sekuritisasi isu di sungai Mekong masih jarang ditemukan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Keamanan

Hingga saat ini istilah keamanan sendiri masih memiliki definisi universal yang beraneka ragam, sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak keamanan dapat dikategorikan sebagai: (1) *International Security*, untuk level dunia (2) *National (State) Security*, untuk level

negara, (3) *Public Security (and Order)*, untuk level masyarakat, dan (4) *Human Security*, untuk level individu.³⁹

Menurut Booth dan Wheeler keamanan hanya dapat diraih apabila ia dipahami sebagai sebuah proses emansipasi.⁴⁰ Mereka mengatakan bahwa stabilitas keamanan itu sendiri hanya mampu dicapai oleh orang-orang dan kelompok-kelompok jika mereka tidak saling menghancurkan satu sama lain. Sementara Arnold Wolfers mengatakan bahwa keamanan dalam pengertian objektif adalah ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai serta secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.⁴¹ Lippmann mengatakan bahwa sebuah bangsa dikatakan aman apabila mampu mempertahankan keadaan tidak dalam bahaya akan pengorbanan nilai-nilai pokok jika berharap untuk menghindari perang dan jika ikut berperang harus mampu untuk mempertahankan kemenangannya.⁴²

Studi keamanan pada awalnya hanya berfokus pada isu militer atau strategis saja serta memiliki kecenderungan terpengaruh oleh aliran realisme. Pada perkembangannya, Barry Buzan melihat bahwa studi keamanan merupakan cabang dari politik, serta tetap memasukkan nilai realisme di dalamnya.⁴³ Walaupun terdapat

³⁹Poppy Irawan. *Kabut Asap : Sebagai Isu Ancaman Non-Tradisional Dalam Kajian Keamanan Regional*. 2007. Dipresentasikan pada persidangan 50 tahun hubungan Indonesia-Malaysia, dipublikasikan pada Working Paper University Malaya, Malaysia.

⁴⁰Booth dan Wheeler. dalam Baylis & Steve Smith, “ *The Globalization of World Politics*”(Oxford University Press, 1999) sebagaimana dikutip dalam poppy, kabut asap.

⁴¹ Arnold Wolfers, dalam Baylis & Steve Smith, “ *The Globalization of World Politics*”(Oxford University Press, 1999) sebagaimana dikutip dalam poppy, kabut asap.

⁴² Walter Lippmann dalam Baylis & Steve Smith, “ *The Globalization of World Politics*”(Oxford University Press, 1999) sebagaimana dikutip dalam poppy, kabut asap.

⁴³ Barry Buzan, (1987), *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: Macmillan.

perspektif baru mengenai studi keamanan yang memasukkan politik, bukan berarti studi keamanan tidak membahas mengenai hal teknis terkait militer seperti rudal, kapal tempur, dll. Studi keamanan akan tetap membahas hal tersebut, namun terdapat penambahan fokus mengenai politik. Selain itu, pendekatan *problem solving* dalam studi keamanan akhirnya membuka jalan bagi studi politik untuk masuk ke dalam studi keamanan.

Pasca berakhirnya perang dingin konsep keamanan memiliki makna yang lebih luas dan dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan isunya yaitu konsep keamanan dengan isu tradisional dan konsep keamanan dengan isu non-tradisional. Apabila dilihat secara tradisional, keamanan tampak ketika sebuah negara mendeklarasikan kondisi darurat, dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk menghalangi perkembangan dari ancaman yang bersangkutan.⁴⁴

Konsep keamanan dengan isu tradisional merupakan konsep yang cenderung berfokus pada negara sebagai unit utama dengan sektornya yaitu sektor militer dan politik saja. Dijelaskan bahwa konsep keamanan dalam konteks militer dan politik menurut isu keamanan tradisional dapat diartikan sebagai cara untuk bertahan. Dimana sebuah isu ditampilkan sebagai sebuah ancaman yang mengacu pada sebuah objek baik itu negara, pemerintah, teritorial maupun masyarakat.

Gagasan mengenai keamanan non-tradisional (ancaman non-militer) mulai muncul pada era akhir 1980-an yang dilakukan oleh beberapa pemikir, salah satunya

⁴⁴ Waever 1988 dan 1995 b, dikutip dalam Barry buzan, Ole Waever, and Jaap De Wilde, *Security a New Framework for Analysis*. (Colorado, USA : Lynne Rienner Publisher, Inc, 1998)

adalah Barry Buzan. Asumsi utama dalam kerangka pikir yang diusung oleh Barry Buzan dan beberapa teorisi lainnya tersebut selanjutnya dikenal sebagai kelompok pemikir *Copenhagen School*. Pemikiran ini menyatakan eksistensi tipologi ancaman baru tersebut harus direspon dengan perubahan kerangka pemikiran studi keamanan yang beranjak dari batasan telaah studi keamanan tradisional. Studi keamanan non-tradisional mempercayai bahwa negara bukanlah satu-satunya subyek dalam studi keamanan.⁴⁵ Lebih jauh, studi keamanan non-tradisional juga merasa memiliki kebutuhan untuk memperluas agenda keamanannya menjadi lima sektor keamanan yang merepresentasikan lima wujud ancaman dan lima domain aspek yang berpotensi menjadi objek ancaman (*referent objects*).⁴⁶

Buzan mengatakan, “*If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.*”⁴⁷

Buzan mengkategorikan lingkup isu keamanan ke dalam 5 sektor, dimana tiap sektornya mengidentifikasi dari interaksi yang ada. Adapun isu yang dimasukkan Buzan seperti: Sektor militer (*forceful coercion*); Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan); Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial); Sektor sosial (*collective identity*); Sektor lingkungan (aktifitas manusia dan *the planetary biosphere*).⁴⁸

⁴⁵ Ullman, Richard. “*Redefining Security*”, *International Security Journal*, vol. 8, dalam, Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “*A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era*”. Diakses dari http://www.afespress.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, (terakhir diakses 08 Maret 2017)

⁴⁶ Buzan, hal 21-23

⁴⁷ Barry Buzan *et al.*, (1993), *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*, London: Pinter, hal. 24-7.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 7- 8.

Selain itu aktor yang terlibat tidak lagi hanya seputar negara saja melainkan juga Organisasi Internasional (Global dan Regional), Organisasi Non-pemerintahan (Global, Regional dan Lokal), Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan (Perusahaan Multi-nasional dan Trans-nasional, Kaum-Kaum Epistemik, individu, Partai Politik dan lain-lain).⁴⁹ Lebih lanjut Buzan menyampaikan bahwa kepentingan negara yang menentukan karakter dari agenda yang terdapat di atas. Karya yang berjudul “*People, State, and Fear*” merupakan tulisan Buzan yang bertujuan untuk memperluas agenda keamanan suatu negara. Meskipun dalam bukunya, Buzan mencoba untuk memperluas agenda keamanan, namun kecenderungan *state centric* masih tetap terasa.⁵⁰

Pengkajian yang dilakukan Copenhagen school ini memunculkan karya yang berjudul “*The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*”. Buku tersebut menjelaskan pergeseran *referent object* dari negara sebagai objek dan kedaulatan sebagai nilai yang diamankan, menuju masyarakat sebagai *referent* sementara identitas sebagai nilai yang diamankan.⁵¹ Ide ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan *Copenhagen school*. Dari ide inilah konsep sekuritisasi akhirnya muncul.

1.7.2 Sekuritisasi

⁴⁹ *Ibid.* Buzan.

⁵⁰ Barry Buzan, (1991), *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post- Cold War Era*, Brighton: Harvester-Wheatsheaf, hal. 9-20.

⁵¹ Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer & Ole Waeber, (1990), *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*, London: Pinter, hal. 8.

Dalam buku *Security: A New Framework of Analysis* Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya. Sementara itu sekuritisasi adalah sebuah bentuk ekstrim dari upaya politik.⁵² Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan antara lain:⁵³

1. *Nonpoliticized* yang berarti pemerintah tidak menanggapi permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik.
2. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan.
3. *To securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman kemananan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.

Secara tekstual sebuah isu dianggap sebagai isu keamanan internasional apabila isu tersebut membutuhkan prioritas utama sehingga dianggap sebagai isu yang lebih penting dibandingkan isu yang lainnya dan dipandang sebagai ancaman yang nyata

⁵² Buzan, hal.23

⁵³ Buzan,hal.23-24

adanya. Akan tetapi, sebuah isu berubah menjadi isu keamanan tidak hanya disebabkan karena isu yang bersangkutan merupakan isu yang benar-benar mengancam (*existential threat*) namun lebih disebabkan karena isu tersebut dimunculkan sebagai isu yang mengancam.⁵⁴

Dalam buku *On Security*, Ole Waeber menyatakan bahwa: *security* sebagai “*speech act*”. Argumen dasar dari pendekatan sekuritisasi menurut Waeber adalah keamanan merupakan sebuah *speech act* dimana adanya tindakan aktor untuk melabeli sebuah isu menjadi isu keamanan. Selanjutnya, aktor tersebutlah yang akan menyatakan bahwa sebuah *referent object* (objek acuan) merupakan sesuatu yang mengancam. Aktor juga akan menetapkan ukuran-ukuran darurat untuk keberlangsungan *referent object* tersebut. Barulah sebuah isu dapat beranjak dari yang awalnya bisa ditindak lanjuti dengan politik normal saja menjadi harus ditindak lanjuti dengan politik darurat yang memungkinkan aksi secara cepat dan tanpa aturan politik resmi.⁵⁵

Sekuritisasi harus dimaknai sebagai proses intersubjektif. Buzan menyatakan bahwa sekuritisasi merupakan intersubjektif dan konstruksi sosial.⁵⁶ Dalam proses ini sebuah isu direpresentasikan sebagai ancaman yang nyata adanya oleh elit politik dan sosial, isu itu akan dianggap mengancam keamanan jika *audience* (publik)

⁵⁴Buzan. 24-25

⁵⁵Ryta Floyd. *Security And The Environment: Securitisation Theory and the U.S Environment Security Policy*. (London: Cambridge University Press, 2010),hal.13.

⁵⁶Buzan. 31

menerimanya. Untuk mendapatkan persetujuan dari *audience* ini maka *agent* sekuritisasi harus membujuk *audience* dengan berbagai tindakan yang dilakukannya.⁵⁷

Selanjutnya Buzan, Waeber, Jaap de Wilde mengatakan dalam melakukan analisa keamanan dan pengartikulasian keamanan melalui pendekatan *speech-act*, dibutuhkan tiga bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa proses sekuritisasi, antara lain terdiri dari: □

- 1) *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan mempunyai tuntutan resmi untuk bertahan. Berdasarkan pandangan tradisional yang menjadi *referent object* ini biasanya adalah negara ataupun bangsa. Bagi negara yang menjadi *referent object* adalah kedaulatan, bagi bangsa adalah identitas.⁵⁸ Namun *referent object* saat ini tidak hanya sebatas negara ataupun bangsa saja, melainkan berbagai spektrum menungkingkan untuk menjadi *referent object*.⁵⁹ Pada hakekatnya, aktor yang memunculkan isu keamanan bisa saja membangun segala sesuatu sebagai sebuah *referent object*. Faktor yang nantinya akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah isu menjadi isu keamanan adalah perbedaan kemampuan aktor dalam mengagendakan isu bersangkutan.
- 2) *Securitizing actors*: adalah seseorang ataupun kelompok yang melakukan aksi *speech-act* dan berusaha membuat sebuah isu berubah menjadi isu keamanan.⁶⁰

⁵⁷ Watson. 19

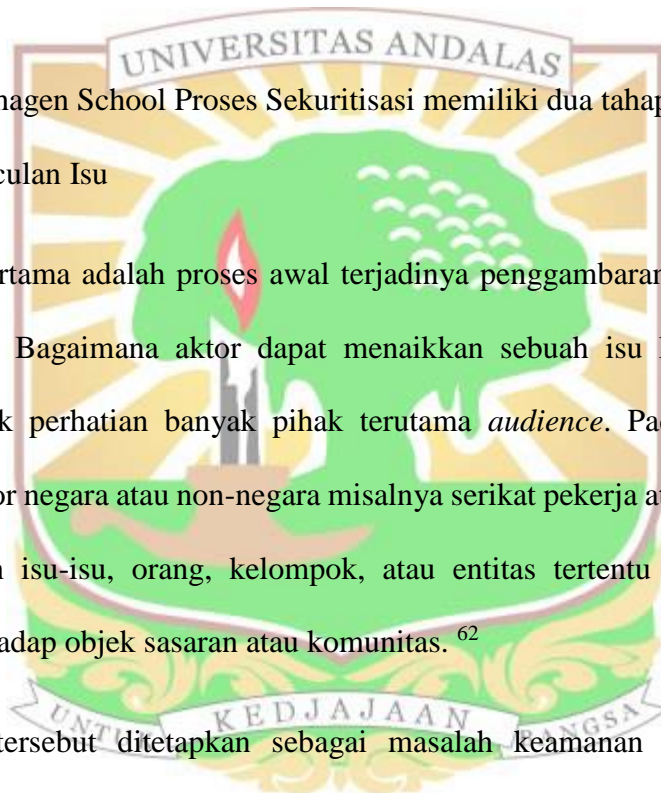
⁵⁸ Waeber, hal.36

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hal.40

Aktor sekuritisasi bisa saja berasal dari birokrat, pemerintah, pimpinan politik, pelobi, dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan.

- 3) *Functional actors*: adalah aktor yang memberikan efek dalam dinamika sebuah sektor dan memainkan peran penting akan tetapi tidak berusaha untuk menjadikan isu tersebut sebagai isu keamanan.⁶¹



Menurut Copenhagen School Proses Sekuritisasi memiliki dua tahap, yaitu :

1. Tahap Pemunculan Isu

Yang pertama adalah proses awal terjadinya penggambaran dan pemunculan isu-isu tertentu. Bagaimana aktor dapat menaikkan sebuah isu kepermukaan dan berhasil menarik perhatian banyak pihak terutama *audience*. Pada tahap pertama sekuritisasi, aktor negara atau non-negara misalnya serikat pekerja atau gerakan rakyat menggambarkan isu-isu, orang, kelompok, atau entitas tertentu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek sasaran atau komunitas.⁶²

Isu-isu tersebut ditetapkan sebagai masalah keamanan nasional ataupun internasional karena dianggap lebih penting daripada yang lainnya. Isu tersebut bahkan dapat didramatisasi dan dipresentasikan untuk menjadi 'prioritas tertinggi' agar memungkinkan pelaku sekuritisasi dapat mendahulukannya sebelum hal-hal lain. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa proses sekuritisasi disini dibangun secara sosial, karena sebuah isu diubah menjadi agenda keamanan dengan hanya

⁶¹ *Ibid*, hal.36

⁶² Open Edition Books. *Securitization theory according to the Copenhagen School*. Diakses dari <http://books.openedition.org/iheid/719> (terakhir diakses 5 Maret 2017)

membangkainya sebagai ancaman, bukan hanya karena adanya ancaman eksistensial nyata. Di sisi lain, Copenhagen School juga memandang sekuritisasi sebagai "*intersubjective practice*" dari aktor sekuritisasi yang bertindak terhadap *audience* yang signifikan.⁶³

2. Tahap meyakinkan *audience*

Tahap kedua yang lebih penting adalah menyangkut keberhasilan sekuritisasi yang bergantung pada berhasil atau tidaknya *audience* diyakinkan untuk menerima bahwa sebuah objek rujukan tertentu memang terancam secara eksistensial. Dalam konsep pertama Wæver, keamanan disamakan dengan sebuah pidato, sementara sekuritisasi mengacu pada bagaimana sebuah isu digambarkan secara linguistik sebagai ancaman eksistensial. Didalam konsep ini *Copenhagen School* juga memberi penekanan lebih pada peran *audience* untuk mengakui adanya ancaman dan dengan demikian mendukung suatu *speech act*.

Meskipun aktor non-negara berangsur-angsur menjadi lebih penting dalam model sekuritisasi, proses seperti itu tampaknya tetap didominasi oleh aktor yang berpengaruh di posisi atas yang kebanyakan diisi oleh pemerintah suatu Negara. Dalam kasus sekuritisasi terkait pembangunan bendungan di sungai Mekong ini, keempat negara yang terlibat yakni Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam merupakan bagian dari MRC yang secara spesifik membahas persoalan terkait pemanfaatan sungai

⁶³ Ibid

Mekong. Oleh karena itu proses sekuritisasi sebagian besar terjadi didalam wadah MRC.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pengagendaan isu menjadi isu keamanan. Pendekatan ini membuat penulis mungkin untuk menghasilkan deskripsi yang rinci tentang sekuritisasi yang berlangsung dan dipraktekan di Mekong Hilir terkait dengan pembangunan proyek PLTA di Xayaburi. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk menyertakan kasus-kasus konkrit sebagai ilustrasi, untuk menopang pendapat-pendapat yang peneliti ajukan.

Bagaimanapun hingga saat ini tidak semua proses proses pengagendaan isu berakhir dengan keberhasilan hingga menghasilkan sebuah tindakan atau kebijakan darurat yang jelas. Melalui penelitian ini peneliti berharap bisa mengungkapkan bukti-bukti baru, beserta rincian faktor yang mempengaruhi sekuritisasi hingga dapat dikatakan berhasil.

⁶⁴DR. Deddy Mulyana, MA. *Methodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001)

1.8.1 Batasan Penelitian

Proses pengagendaan yang akan diteliti difokuskan pada pengagendaan isu sebagai isu keamanan yang terjadi seiring dengan pembendungan di sungai Mekong. Penelitian akan difokuskan mulai pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Batasan tahun tersebut dipilih karena terhitung semenjak tahun 2007, aktor dalam proses sekuritisasi ini mulai mengeluarkan reaksi berupa penolakan terhadap rencana pembangunan bendungan Xayaburi oleh pemerintah Laos. Sementara di tahun 2010 proses konsultasi terkait pembangunan bendungan Xayaburi diajukan ke MRC. Penelitian berakhir sejalan dengan berakhirnya proses sekuritisasi di tahun 2012. Hal ini juga bertujuan untuk memfokuskan peneliti dalam mengidentifikasi bagaimana proses pengagendaan isu terkait sekuritisasi isu mulai dari awal proyek bendungan ini bergulir dan aksi serta interaksi dari para aktor selama kurun waktu tersebut.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui teknik pengumpulan dan berdasarkan penelaah/penelusuran literatur. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun mencari informasi tentang aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah pernah diteliti sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesamaan.⁶⁵

Dalam studi kepustakaan, diasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara

⁶⁵*Ibid*, hal.27

menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain. Data-data tersebut dapat ditemui dalam bentuk buku referensi, jurnal, artikel, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁶

Untuk memilih sumber mana yang relevan penulis melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis, berupa dokumen, jurnal, buku, berita, dan bahan tertulis lainnya, sambil menguji validitasnya dengan membandingkan apa yang peneliti pahami dengan pendapat-pendapat ahlinya atas objek yang diteliti. Sementara itu, untuk mendapatkan data tambahan, penulis menggali data dari berbagai jurnal, berita, dan dokumen-dokumen yang bersumber dari website resmi *Mekong River Commission* (MRC).

1.8.3 Unit Analisa

Dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan pemahaman mendalam tentang tingkat dan unit analisis guna membantu peneliti dalam menyederhanakan objek yang akan ditelitinya. Unit analisa merupakan bagian yang hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan.⁶⁷ Maka unit analisa dalam penelitian ini adalah proses

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Unit dan Tingkat Analisa Politik Internasional (Diakses melalui <http://www.portal-hi.net/en/?id=105:unit-dan-tingkat-analisa-politik-internasional> pada tanggal 25 Mei 2014)*

sekuritisasi yang dilakukan oleh Kamboja dan Vietnam terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di bendungan Xayaburi sungai Mekong. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini pembangunan bendungan Xayaburi di aliran utama Sungai Mekong oleh negara Laos.

1.1.1 Tingkat Analisa

Tingkat analisa (*level of analysis*) adalah area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisa yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kawasan Regional, terutama negara riparian yang tergabung di dalam organisasi *Mekong River Commission* (MRC). Didalam sebuah proses sekuritisasi, elit politik dan sosial akan mencoba mengangkat sebuah isu yang direpresentasikan sebagai ancaman nyata dan mengagendakannya kepada *audience*. Pada penelitian ini, Kamboja dan Vietnam sebagai *lead actor* meyakinkan Laos dan Thailand untuk mengkaji ulang proyek pembangunan bendungan Xayaburi karena dianggap dapat mengancam ketahanan pangan di kawasan hilir sungai Mekong. Keempat negara tersebut telah bergabung dalam MRC sehingga proses sekuritisasi terjadi didalam ruang lingkup organisasi Regional tersebut.

1.1.2 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dimiliki serta informasi-informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi akan dideskripsikan secara tekstual dengan menganalisis isi dokumen. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis dengan cara menetapkan, menguraikan dan mendokumentasikan alur sebab-sebab/konteks-konteks

didalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

1.1.3 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses dimana peneliti berusaha membuat sebuah penjelasan atas objek secara logis dan sistematis, lengkap dengan maknanya.⁶⁸ Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus dilaksanakan dengan teknik analisa yang cocok dengan jenis penelitian.⁶⁹ Sebagaimana layaknya analisis data, proses dilakukan melalui tiga tahapan, (1) pemilahan data/informasi; (2) pengorganisasian, (2) penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah dengan mengidentifikasi dan mencari pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁷⁰ Adapun dalam menganalisis permasalahan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

⁶⁸ Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Techniques in Qualitative Research* (State University of Georgia), hal. 97

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 40

⁷⁰ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e*, (California: Sage Publications Inc, 1999) Hal. 150

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

BAB 2 : Dalam bab ini akan dibahas tentang deskripsi sungai Mekong dan proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di aliran utamanya.

BAB 3 : Dalam bab ini akan dibahas tentang dampak dan reaksi dari *shareholders* terkait proyek bendungan Xayaburi.

BAB 4 : Pada bab ini akan dilakukan analisis tentang proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor termasuk diantaranya proses serta tahap dari sekuritisasi.

BAB 5 : Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian berupa hasil konstruksi jawaban dari rumusan masalah, serta saran sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini

